



Masih Diperlukan Penanganan *illegal Migrant* Yang Lebih Holistik Dan Komprehensif

“**B**erbagai kerjasama dalam penanganan *illegal migrant*, umumnya masih bersifat bilateral antara dua Negara. Untuk itu formulasi penanganan yang holistik dan komprehensif sangatlah diperlukan.”

Hal tersebut dinyatakan oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA saat membuka *Roundtable Discussion* tentang Penanganan *Illegal Migrant* dalam rangka Ketahanan Nasional pada hari Selasa (21/5) di Ruang Nusantara I, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

bersambung ke hal. 2....



DAFTAR ISI



Foto : Humas Lemhannas

Dalam *keynote speech*-nya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa disinyalir saat ini Indonesia selain menjadi transit, juga menjadi tujuan bagi para imigran. Menurutnya pula eskalasi masuknya *illegal migrant* tersebut, ibarat gunung es yang sulit diselesaikan secara tuntas, bahkan ada indikasi tindakan *illegal migrant* telah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan bisnis yang mengarah pada timbulnya berbagai *transnational organized crime, people smuggling especially women and children, international terrorism* dan *illegal border entry*.

Hadir sebagai narasumber Wakil Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ida Bagus K. Adnyana, SH, MH., Julianita Natalegawa dari National Programme Officer-International Organization for Migration dan Asisten Protection Officer – UNHCR Derwin Djamaris. Selain itu turut hadir Asisten Operasi Kasal Laksda TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA, Athan Kedutaan Besar Australia John L. Gould, MA, Direktur Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Polisi Herry Prastowo SH, M.Si dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Prof. Sudaryono, SU sebagai penanggung.

Permasalahan *illegal migrant* merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, sehingga muncullah konvensi wina tahun 1951 dan protokol tahun 1967 yang menjadi dasar dalam penanganan para *migrant*. Namun demikian, berbagai pertimbangan kepentingan nasional, sehingga belum semua negara meratifikasinya, termasuk Indonesia.

Secara empiris Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang terkena dampak masalah *illegal migrant*, khususnya dari kawasan Asia Pasifik, dan sejauh ini belum ada mekanisme yang komprehensif di kawasan untuk mengatasi masalah *illegal migrant* tersebut.

Oleh karena itu, Gubernur berharap melalui *roundtable discussion* ini dapat menjadi masukan bagi Lemhannas RI, dalam menyusun *policy recommendation* untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan penanganan *illegal migrant*.

Roundtable discussion tersebut juga dihadiri oleh para pejabat struktural Lemhannas RI, para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI.



1 Masih Diperlukan Penanganan *Illegal Migrant* Yang Lebih Holistik Dan Komprehensif



3 Pembangunan Sosial Budaya dalam Pandangan Sosiologi



4 Nilai-Nilai Kebangsaan Menjadi Unsur Utama Membangun Karakter Kebangsaan



5 Kunjungan Royal College Defence Studies (RCDS) Inggris



6 Gubernur Lemhannas RI: Kerjasama Dan Kemitraan Indonesia-Australia, Langkah Cerdas Kedua Negara



7 Indonesia Scenarios to 2045: Perkiraan Prioritas Tantangan Pembangunan Masa Depan



8 Kunjungan Peserta CDSS-Australia ke Lemhannas RI



9 Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR RI



10 Studi Strategis Luar Negeri PPARA XLIX Lemhannas RI



12 PPSA XLIX Lemhannas RI, Memantapkan Pimpinan Tingkat Nasional

REDAKSI

Pengarah :

Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Brigjen TNI Sahat Aritonang.

Redaktur :

Megawarni Simamora, S.E, M.M.

Penyunting/Editor :

Letkol Caj G.T. Situmorang.

Redaktur Pelaksana :

Bambang Iman Aryanto, S.T., Trias Noverdi, S.S.,

Endah Heliana, S.Sos.

Desain Grafis & Fotografer :

Arianto S.H., Sertu Syafrizal.

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono, Suryadi.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan

Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>



Pembangunan Sosial-Budaya dalam Pandangan Sosiologi

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 Lemhannas RI, (22/5) Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc melakukan orasi ilmiah di Auditorium Lemhannas RI. Orasi ilmiah ini sendiri dilaksanakan sesaat setelah upacara peringatan HUT ke-48 Lemhannas RI di tempat yang sama.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Staf AL Laksamana TNI Marsetio, Duta Besar RI untuk Myanmar Sebastian Sumarsono.

Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc, dalam orasinya yang mengangkat tema Konsep Pembangunan Sosial melalui Sudut Pandang Sosiologi mengatakan bahwa pembangunan bukan hanya “meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi”, tetapi meningkatkan “kualitas kehidupan sosial-budaya”. Menurutnya ada 3 (tiga) orientasi pembangunan yaitu orientasi pada pertumbuhan, manusia dan elemen dasar hubungan sosial.

“yang terpenting dari pembangunan aspek sosial-budaya adalah “nilai” yang membimbing pembangunan itu”, kata Guru Besar Universitas Indonesia tersebut.

Ditegaskannya bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan jelas bukan merupakan pembangunan “yang sebenarnya” karena tidak ada substansi nilai-nilai yang menjadi acuannya.

Melihat kondisi “prosesual” di era reformasi, secara sosiologis memiliki potensi yang sangat menjanjikan seperti desentralisasi dan otonomi, kebebasan pers, kebebasan informasi, dan adanya mahkamah konstitusi, KPK bahkan DPR/D. Hal ini merupakan pembangunan struktural yang ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Prof. Dr. Paulus

Wirutomo, M.Sc berpendapat bahwa “pembangunan kehidupan sosial-budaya” tidak boleh direduksi menjadi “pembangunan sektor sosial-budaya”.

“kehidupan sosial-budaya (*socio-culture life*) mencakup seluruh kondisi interaksi dan interaksi sosial yang sistemik dan holistik dari aspek ekonomi, politik, agama, kemanan dan sebagainya”, jelasnya.

Semua sektor harus berakar pada suatu cita-cita kehidupan sosial budaya tertentu, dimana terdapat 3 (tiga) elemen dasar yaitu struktur sosial, kultur dan proses sosial. Dan menurutnya, merupakan tantangan substansial bagi para ilmuwan sosial budaya untuk mengembangkan konsep “Pembangunan Sosial”.

Konsep pembangunan sosial bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan atau menarik garis dari pembangunan ekonomi. Kehidupan ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan sosial budaya, maka pembangunan sosial haruslah merupakan landasan dari pembangunan ekonomi.

Menurutnya, ekonomi tidak boleh dibangun untuk sekedar tujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dibangun agar manusia yang hidup di dalam masyarakat dapat menikmati “kehidupan sosial-budaya” yang sejahtera dan makmur secara inklusif. Sehingga “pertumbuhan ekonomi”, harus secara langsung melekat (bukan sekedar diseimbangkan) dengan peningkatan kualitas “kehidupan bermasyarakat” atau “kehidupan sosial-budaya” (*good society*).

Orasi Ilmiah yang merupakan satu dari rangkaian puncak HUT ke-48 Lemhannas RI tersebut, selain dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional turut dihadiri oleh para Mantan Gubernur Lemhannas RI, peserta PPR ke-49 dan ke-50, dan undangan lainnya.



Foto : Humas Lemhannas

Nilai-Nilai Kebangsaan Menjadi Unsur Utama Membangun Karakter Kebangsaan

Senin, (27/5) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Pemerintah Daerah Angkatan ke-35 tahun 2013 resmi dibuka oleh Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Santoso di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari tugas dan fungsi Lemhannas RI dalam melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa. Pemantapan yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari ini mengusung tema Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Era Globalisasi guna Penguatan Etika Politik.

Nilai-nilai kebangsaan menjadi unsur utama dalam membangun karakter kebangsaan dalam

bernegara (*Nation Character Building*). Hal ini membuat Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang memiliki jati diri, bangsa yang bermartabat, bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya, termasuk bangsa yang menghargai bangsa lain.

Para peserta yang juga sebagai wakil rakyat, memiliki tugas membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, beretika, bermartabat dan berbudaya, tidak menginginkan demokrasi berubah makna menjadi kebebasan hingga melampaui batas etika politik.

Demokrasi idealnya berjalan dengan baik bila didukung oleh stabilitas politik yang mantap dan sehat. Stabilitas politik hanya akan terwujud bila budaya politik yang

dikembangkan selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai inilah yang menjadi acuan dan sekaligus penuntun dalam etika berpolitik

Dengan diselenggarakannya pemantapan nilai-nilai ini diharapkan peserta dapat memiliki pola berpikir komprehensif, integral, holistik dan sistemik berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, bersikap antisipatif, kooperatif dan sinergik terhadap kepentingan rakyat, peka dan peduli terhadap berbagai potensi konflik yang berkembang di daerah serta mampu berperan aktif dalam menyelesaikan masalah bangsa secara professional dan proporsional.

Selain dihadiri oleh Tenaga Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional Lemhannas RI, acara pembukaan ini dihadiri pula oleh pengurus Adeksi beserta jajarannya.

Kunjungan Royal College Defence Studies (RCDS) Inggris

Delegasi Royal College Defence Studies (RCDS) yang dipimpin oleh David Robert Bill (Let. Gen Ret.) melakukan kunjungan resmi ke Lemhannas RI pada hari Selasa (28/5).

Delegasi yang berjumlah 16 orang tersebut diterima oleh Deputy Pengkajian Lemhannas RI Irjen Polisi Drs. Herry Haryanto beserta Pejabat Lemhannas RI lainnya dan beberapa perwakilan dari peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L. Pihak Lemhannas RI menyambut baik atas kunjungan delegasi RCDS yang ingin berdiskusi tentang permasalahan radikalisme di Indonesia.

Dalam diskusi, Lemhannas RI sendiri menganggap Radikalisme itu mencakup berbagai aspek, seperti politik, pendidikan, sosial dan budaya. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya terorisme di Indonesia antara lain masalah politik, ekonomi, tekanan sosial, dan kemiskinan. Radikalisme di Indonesia bukan hanya terorisme tetapi menyangkut kemiskinan, pengangguran, penyebaran minuman keras dan korupsi.

Pimpinan delegasi RCDS, David Robert Bill mengatakan bahwa siswa yang direkrut memiliki berbagai latar belakang sehingga memungkinkan beragamnya pandangan dalam melihat permasalahan terorisme dan radikalisme. Ia juga mengatakan bahwa lebih dari 60 % siswa di RCDS berasal dari Negara yang berbeda.

Menurutnya, radikalisme dan terorisme merupakan subyek yang kurang nyaman untuk didiskusikan karena

menyentuh berbagai aspek, baik agama, sosial, politik, maupun latar belakang kebudayaan. Namun jalan tersebut harus diambil untuk menciptakan pandangan yang komprehensif dalam melihat permasalahan tersebut dengan berbagai perspektif.

“Penanganan terorisme dan radikalisme tidak hanya melalui aspek militer. Negara yang menghadapi masalah terorisme dan radikalisme dapat menggunakan media sebagai medium untuk membagi pandangan mengenai multikulturalisme dan mengurangi sensitivitas/kecurigaan antar kelompok. Media memiliki peran penting bukan untuk mempertajam permasalahan yang terjadi dan menjadi konflik tersendiri dalam masyarakat. Tetapi mampu menyebarkan paham toleransi kepada masyarakat.”, jelasnya.

Indonesia sendiri, menurut Lemhannas RI telah melakukan cara pencegahan dan penindakan. Baik melalui pendekatan keras yang dulu pernah dilakukan maupun pendekatan lunak yang saat ini lebih dikedepankan melalui reedukasi, rehabilitasi, reorientasi dan resosialisasi seperti yang dilakukan Lemhannas RI dengan program *Training of Trainer*-nya.

Melalui kunjungan dan diskusi antara Lemhannas RI dan RCDS ini diharapkan adanya pertukaran informasi dan berguna bagi kedua Negara sehingga dapat memberi peluang bagi pengembangan kerja sama di masa yang akan datang.



Foto : Humas Lemhannas

Gubernur Lemhannas RI:

Kerjasama Dan Kemitraan Komprehensif Indonesia – Australia, Langkah Cerdas Kedua Negara

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA memberikan ceramah umum kepada sejumlah siswa Defence Strategic Studies Course pada hari Rabu (29/5) waktu setempat di Australian Defence College, Australia.

Pemberian ceramah dilakukan dalam kunjungannya ke Australian Defence College. Kunjungan Gubernur Lemhannas RI ini disambut oleh Commander Australian Defence College Major General Craig Orme, AM, CSC, Commandant Australian Command and Staff College Brigadier Peter Gates, CSM, Principal Centre for Defence and Strategic Studies Mr. Ian Errington.

Dalam ceramahnya, Gubernur menyampaikan tentang Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia memiliki peran penting dan strategis di kawasan Asia Pasifik pada umumnya dan Asia tenggara pada khususnya. Peran penting dan strategis ini tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang dilalui oleh SLOCs (*Sea Lines of Communications*) dan SLOT (*Sea Lines of Oil Trade*) antar dua kawasan tersebut.

Menurutnya, ditinjau dari perspektif geopolitik, keberadaan Indonesia di persilangan dan pertemuan berbagai kepentingan di dua kawasan, memberikan dampak positif maupun negatif, langsung maupun tidak langsung bagi bangsa Indonesia.

Dengan akan diberlakukannya Asean *Community* pada tahun 2015 di satu sisi dan memanasnya sengketa di Laut Cina Selatan dan konflik di semenanjung Korea di sisi lain, mengharuskan Indonesia



untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong terciptanya keamanan regional secara menyeluruh.

Bagi Indonesia dan Australia, stabilitas keamanan kawasan merupakan kebutuhan dan jaminan bagi terselenggaranya kepentingan nasionalnya masing – masing. Dengan latar belakang hubungan yang dinamis dan semakin kondusif diantara keduanya, kerjasama dan kemitraan strategis komprehensif yang telah terbangun diharapkan akan memberi pengaruh dan kontribusi bagi terwujudnya stabilitas keamanan regional maupun keamanan nasional masing – masing.

Selain itu, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai pandangan geopolitik dan geostrategi Indonesia, perspektif Indonesia dalam hal Keamanan Nasional dan Keamanan Regional dan hubungan antara Indonesia dengan Australia.

Selanjutnya disampaikan bahwa kerjasama konstruktif Indonesia dengan negara – negara di kawasan merupakan kebutuhan yang terus dibangun berdasarkan azas *mutual respect*, *mutual trust* dan *mutual interests*. Oleh karena itu, Kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia – Australia merupakan langkah cerdas dua bangsa yang dilandasi oleh tiga azas tersebut demi kepentingan kedua bangsa.

Gubernur berharap kemitraan komprehensif kedua negara mampu mendorong terwujudnya stabilitas keamanan regional dan keamanan nasional yang kondusif selaras dengan kepentingan nasionalnya masing – masing.

Turut mendampingi Gubernur Lemhannas RI dalam kunjungan ini adalah Prof. Edy Prasetyono, Mayjen TNI Endang Hairudin dan Mayjen TNI Abdul Chasib. Dalam kesempatan ini, Gubernur beserta rombongan juga mengunjungi ke beberapa tempat strategis di Australia.

Indonesia Scenarios to 2045 :

Perkiraan Prioritas Tantangan Pembangunan Masa Depan



Lemhannas RI menyelenggarakan diskusi “Indonesia Scenarios to 2045 : Perkiraan Prioritas Tantangan Pembangunan Masa Depan” pada Selasa (4/6) di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Trigatra Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut, Lemhannas RI mengundang para pengamat dan ahli dari berbagai lembaga strategis yakni Dewan Pertimbangan Presiden, Tim UKP4, Bappenas.

Diskusi ini merupakan langkah pembentukan skenario Indonesia menuju 2045, serta pembentukan White Paper yang akan memuat rekomendasi kebijakan untuk melihat berbagai peluang dan mengatasi ketidakpastian, tantangan, dan isu terkait pembangunan Indonesia.

Hadir dalam diskusi tersebut yakni Dr. Emil Salim, Dr. Aviliani, Darwin Silalahi, Prof. Dr. Taufik Abdullah, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, M.I. Zulkarnain Duki, S.E., MBA., Ph.D., Dr. Raden Pardede, Budiman Sudjatmiko, Felia Salim, dan Dr. Ismeth.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Cho Kong, Kepala Analisis politik dari Shell International memaparkan “New Lens Scenario 2013” yang memberikan analisa mendalam mengenai arus ekonomi, sosial, energi, dan politik pada abad ke-21, dan konsekuensinya bagi sistem energi global, pemerintahan, juga lingkungan hidup.

Diperkirakan, pada tahun 2045, sumber energi, air dan makanan sedunia mengalami tekanan, dan populasi global akan mencapai angka 9 milyar. Peningkatan kemakmuran telah mengangkat ratusan juta orang keluar dari garis kemiskinan, namun emisi gas rumah kaca sedunia mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi. Banyak negara bertransformasi dari masyarakat rural menjadi urban, hal tersebut diiringi dengan meningkatnya arus informasi dan pertumbuhan “suara individual” yang juga turut mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Diskusi tersebut merupakan diskusi lanjutan yang sebelumnya telah diselenggarakan pada 15 Mei 2013 antara ahli dan lembaga *think tank* Indonesia, yakni Dewan Pertimbangan Presiden, Lemhannas RI, Bappenas, dan UKP4.

Diskusi antara lembaga strategis dan para ahli ini akan diselenggarakan secara berkelanjutan selama enam bulan untuk mampu membentuk tim serta rencana kerja terkait dengan penyusunan *White Paper* tentang Skenario Indonesia Menuju 2045.

Diharapkan, Skenario Indonesia Menuju 2045 yang dihasilkan bisa menjadi bahan masukan kepada Presiden serta para menteri dan lembaga terkait.

Kunjungan peserta CDSS-Australia ke Lemhannas RI

Selasa, (4/6), Jakarta, The Centre for Defence and Strategic Studies (CDSS)-Australia melakukan kunjungan resmi ke Lemhannas RI. Kunjungan tersebut merupakan salah satu tujuan dari program studi di CDSS.

Rombongan CDSS yang terdiri dari 18 orang ini dipimpin oleh Principal CDSS Mr. Ian Errington, AM, CSC di terima oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, Wakil Gubernur Lemhannas RI, dan beberapa pejabat Lemhannas RI lainnya.

Kemudian kunjungan tersebut dilanjutkan dengan acara diskusi berbentuk *Small Group Discussion* dengan para pejabat dan para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional serta perwakilan dari peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) di Gedung Astagatra Lt. 4, Lemhannas RI, Jakarta.

Diskusi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Dede Rusamsi ini membahas tentang Perkembangan Keamanan Laut China Selatan dan Pengaruhnya terhadap Kawasan Internasional, Regional dan Nasional. Turut diundang dalam diskusi tersebut adalah perwakilan tetap Indonesia untuk ASEAN, Ngurah Swajaya sebagai narasumber. Selain paparan oleh Ngurah Swajaya, perwakilan dari peserta dari CDSS juga

melakukan paparan.

Oleh karena besarnya potensi konflik yang ada di kawasan Laut Cina Selatan yang akan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan khususnya Asia Tenggara, membuat isu strategis ini diangkat sebagai bahan diskusi tersebut.

Melalui *Small Group Discussion* tersebut, diharapkan dapat melahirkan kesamaan persepsi dan menambah pandangan serta pengetahuan tentang Laut Cina Selatan, untuk dijadikan bahan analisa dan pemikiran untuk menghadapi potensi konflik yang terjadi dikawasan Laut Cina Selatan.



Foto : Humas Lemhannas

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI

Memenuhi undangan pimpinan Sekretaris Jenderal DPR RI, Selasa (4/6), segenap jajaran pimpinan Lemhannas RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI. Rapat yang membahas tentang Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013 berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta.

RDP yang dihadiri beberapa Kementerian dan Lembaga lain tersebut, Sekretaris Utama Lemhannas RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Lemhannas RI Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. menyampaikan dalam penjelasan tertulisnya bahwa Lemhannas RI telah melaksanakan *self blocking* terhadap program kerja dan anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut dari kebijakan pemerintah untuk Penghematan dan Pengendalian Anggaran K/L guna

pengamanan APBN TA 2013.

Self blocking yang dilakukan Lemhannas RI telah sesuai kriteria dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan, berasal dari efisiensi belanja modal, yaitu pengurangan volume output kegiatan yang selanjutnya akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya secara operasional. Lemhannas RI telah memastikan bahwa penghematan yang dilakukan ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya karena termasuk dalam sistem pendukung (*supporting system*).

Dalam penjelasan selanjutnya, disampaikan bahwa Lemhannas RI telah mengantisipasi dengan kesungguhan demi tercapainya sasaran delapan area perubahan, mulai dari perubahan kelembagaan melalui revitalisasi organisasi, penataan SDM aparatur yang meliputi system rekrutmen, penempatan berbasis kompetensi, peningkatan

kapasitas SDM hingga perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja.

Dengan semangat reformasi birokrasi yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), Lemhannas RI telah menyusun konsep optimalisasi anggaran, melalui efisiensi belanja honor maupun belanja bahan. Hasil dari optimalisasi tersebut direncanakan untuk mendukung kegiatan prioritas yang belum terprogram.

Selain itu juga, disampaikan informasi awal tentang hasil Konsultasi kepada Presiden pada tanggal 20 Mei lalu kepada Komisi I DPR RI. Dimana dalam arahannya, Presiden menyatakan pemahaman dan persetujuan serta mendukung penuh atas rencana jangka panjang Lemhannas RI dalam mewujudkan cita-citanya sebagai lembaga berkelas dunia.



Studi Strategis Luar Negeri PPRA XLIX Lemhannas RI

INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE



Foto : PPRA 49 Lemhannas

Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX melakukan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) yang merupakan salah satu kegiatan utama dalam program pendidikan di Lemhannas RI dengan tujuan ketiga negara yaitu ke Brunei Darussalam, Kamboja dan Laos.

Studi Strategis yang berlangsung sejak 26 Mei sampai dengan 31 Mei 2013, bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para peserta PPRA XLIX untuk mengenal dan melihat secara langsung tentang strategi, pola dan sistem pembangunan nasional dari negara tujuan, untuk digunakan sebagai pembandingan terhadap Ketahanan Nasional Indonesia.

Dalam kunjungan ketiga Negara tujuan, PPRA XLIX yang terbagi menjadi tiga rombongan mengagendakan kunjungan ke berbagai instansi pemerintah dan industri strategis di Negara tujuan.

Di Negara Brunei Darussalam, selain ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, para peserta



Foto : PPRA 49 Lemhannas

yang berjumlah 27 peserta melakukan kunjungan ke instansi pemerintah dan industri strategis di Brunei Darussalam seperti Majelis Legislative Council/ Mesyuarat Negara, Kementerian Pertahanan (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute of defence and Strategis Studies), Kementerian Industri, Kementerian Pendidikan, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah-Universiti Brunei Darussalam, Kementerian

Luar Negeri dan Perdagangan, Kementerian Energi, Majelis Melayu Islam Baraja dan Brunei Shell Petroleum.

Sementara pada waktu yang sama, rombongan lain yang berjumlah 26 peserta mengunjungi Negara Kamboja dengan tujuan ke beberapa instansi pemerintah dan salah satu industri strategis di Negara tersebut. Beberapa diantaranya seperti, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, National Defence University of Cambodia, Cambodia Campaign to Ban Land Mines and Cluster Munitions, Museum Genocide Tuol Sleng, dan Museum Killing Field.

Sedangkan 27 peserta lainnya yang terbagi ke dalam rombongan SSLN ke Negara Laos, melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan beberapa instansi pemerintah dan institusi pendidikan di Negara Laos seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Olah Raga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Akademi Militer dan Universitas Laos.



Melalui program kegiatan SSLN ini, para peserta memiliki kesempatan untuk mempelajari, memahami dan mengkaji hal-hal yang menjadi gambaran kondisi wilayah yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dalam perspektif ketahanan nasional.

Diharapkan hasil studi strategis ini memberikan sumbangsih buah pemikiran yang cemerlang dan konstruktif bagi Lemhannas RI dan Indonesia.



PPSA XIX Lemhannas RI, Memantapkan Pimpinan Tingkat Nasional



Foto : Humas Lemhannas

Upacara Pembukaan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX diselenggarakan pada hari Selasa (11/6) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta.

Upacara Pembukaan PPSA XIX Lemhannas RI yang dihadiri Staf Khusus Presiden TB. Silalahi, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, dan Dansesko TNI Marsdya TNI Ismono Wijayanto dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Program Pendidikan ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI dalam membantu Presiden dalam penyelenggaraan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berfikir secara komprehensif, integral, holistik dan sistemik serta profesional, memiliki watak, moral, etika kebangsaan, dan berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.

PPSA XIX yang berlangsung selama 5,5 bulan

ini diikuti 53 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang seperti dari birokrat, TNI, Polri, Akademisi, Perguruan Tinggi, Kader Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan keberagaman latar belakang para peserta diharapkan mampu mendinamisasikan proses pendidikan yang akan berlangsung. Selain itu, juga dapat sekaligus membentuk watak dan karakter para pimpinan tingkat nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan visioner.

Gubernur juga berharap dalam proses pendidikan, seluruh peserta mampu menjunjung tinggi kejujuran, moralitas dan etika akademik dalam menyelesaikan berbagai kewajiban maupun penugasan yang diberikan.

Turut hadir dalam upacara pembukaan tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, Para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji dan Tenaga Profesional, serta para pejabat Struktural Lemhannas RI lainnya.